

KIRIM KOREKSAN,
SARAN, KRITIK & OPINI

- PEMBACA dapat mengirimkan saran, kritik dan komentar terhadap pelayanan umum pemerintahan, kamtibmas, dan lainnya melalui sms dan email.
- SETIAP artikel/opini yang dikirim disertai brosur identitas pengirim. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi milik Radar Sulbar, karena itu naskah yang sama tidak boleh/diambil untuk diterbitkan ke media lain.
- PENULISAN opini yang dikirim minimal 850 kata dan maksimal 950 karakter.



Alamat: 0811 4214 444
Lampiran: 0812 9922 0090



Cover: Ariswan & Sahari
redaksi@radar.sulbar.id

BUMDes Sumber Pendapatan Desa Nan 'Seksi'

Salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran.



OLEH:

Yusep Susanto
Auditor di BPKP Sulbar

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, petunjuk teknis mengenai tujuan, bentuk organisasi, susunan kepengurusan beserta hak dan kewajibannya, permodalan, klasifikasi jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepalitiran, kerjasama, pertanggungjawaban pelaksanaan, dan pembinaan pengawasan BUMDes telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Desa PDT nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sehingga tidaklah susah jika desa ingin mendirikan BUMDes karena sudah jelas aturan mainnya.

Perkembangannya pun cukup mengembirakan. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUMDes meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDes hanya sebanyak 1.022 unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit.

Dari jumlah tersebut sebanyak 6.728 unit (36,4%) berada di Nangroe Aceh Danusalam, di-

katulistiwa Barat sebanyak 2.964 unit (16%), dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7%). Sedangkan sisanya tersebar di seluruh Indonesia.

Di Sulbar dengan jumlah 576 desa, telah terbentuk sebanyak 150 BUMDes atau 26% dari jumlah desa. Hal tersebut menunjukkan perkembangan BUMDes di Sulbar cukup baik.

Salah satu BUMDes yang beromset miliaran adalah Tirta Mandiri yang dimiliki Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Berdiri sejak 15 Desember 2009 dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2009, BUMDes Tirta Mandiri telah membukukan omset sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2016.

Pada awal terbentuknya, BUMDes Tirta Mandiri hanya mengelola toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat, serta baru merintis usaha pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi.

Pada tahun 2017 BUMDes Tirta Mandiri telah mempunyai lima unit usaha yaitu pada sektor pariwisata Umbul Ponggok dan Ponggok Ciblon, usaha kredit, toko desa dan sektor pendidikan yaitu studi desa. Pada tahun 2014 BUMDes Tirta Mandiri telah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada desa sebesar Rp 350.000.000, atau 10% dari laba.

Jika kita menghitung jumlah

kontribusi PAD pada tahun 2016, BUMDes Tirta Mandiri maka nilainya sangat besar yang dapat menopang desa dalam melakukan pembangunan di desa.

Tidak kalah maju dengan BUMDes Tirta Mandiri, Pemerintahan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUMDes Panggungharjo Lestari, berdasarkan Peraturan Desa nomor 4 tahun 2015.

BUMDes Panggungharjo mempunyai empat unit usaha yaitu kelompok pengelola sampah, toko desa, pengolahan minyak jelantah dan restoran Kampung Mataraman. Osmetnya pun telah mencapai ratusan juta, sehingga kontribusi PAD kepada Pemerintah Desa Panggungharjo pastinya cukup besar.

Jika melihat kemajuan kedua BUMDes tersebut dan kontribusinya terhadap PAD desa, BUMDes merupakan sumber PAD desa yang 'seksi'.

Di Sulbar, dari 150 BUMDes yang telah berdiri, penulis baru menemukan sebanyak menonjol yaitu BUMDes Batetanggga milik Pemerintah Desa Batetanggga Kecamatan Binuang Polewali Mandar. BUMDes Batetanggga mengelola beberapa unit usaha yaitu retribusi pasar, retribusi wisata, kebersihan (mobil sampah untuk masyarakat) termasuk mobil traktor sawah dan galian pasir.

Jika dilihat dari potensi yang

dimiliki Sulbar rasanya banyak peluang usaha untuk BUMDes yang dapat dijadi. Salah satunya, sektor pariwisata. Sulbar ini kaya akan wisata mulai dari pantai dan sungai yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes. Sulbar juga kaya akan perkebunan, diantaranya kakao, kelapa dan sawit.

Peluang usaha bagi BUMDes adalah menjalankan usaha perantara (brokering) guna memasarkan hasil perkebunan tersebut pada skala pasar lebih luas.

Selama menginjeksi kaki di Sulbar yang telah berjalan selama tiga tahun, penulis merasa prihatin dengan pengelolaan sampah. Masih banyak ditemukan sampah berserakan, baik organik maupun sampah non organik. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi BUMDes membuat lini usaha pengelolaan sampah. Selain itu dapat menghasilkan manfaat ekonomi berbasis juga sebagai pelayanan sosial dalam menjaga lingkungan.

Terlepas dari banyaknya peluang usaha, dalam pemilihan sektor usaha bagi BUMDes disesuaikan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa.

Penulis berharap BUMDes di Sulbar tumbuh maju dan berkembang sehingga meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja serta berkontribusi pada PAD. Mari kita bangun BUMDes ta (***)